

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BALIKPAPAN MELALUI PAJAK DAERAH SEKTOR PARIWISATA

Tiara Apriani Putri Jessy¹

Abstrak

Tiara Apriani Putri Jessy. Skripsi mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Fajar Apriani S.Sos., M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata.

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu pertanyaan sesuai fokus penelitian, sumber data sekunder sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti catatan yang tersusun dalam arsip atau buku pedoman. Untuk penelitian sendiri dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata masih menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diakomodir Oleh karena itu strategi harus di pertahankan dan terus di tingkatkan agar peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata semakin meningkat.

Kata Kunci : *Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah Sektor Pariwisata .*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada tiap daerah kota / kabupaten dalam mengelola rumah tangga dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tiaraputri Jessy93@gmail.com

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah.

PAD adalah cerminan kemandirian suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun kenyataannya masih banyak daerah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena banyak daerah yang tidak menyadari potensi dari sektor-sektor PAD yang ada di daerah mereka dan tidak menjadikan daerah mereka sebagai daerah potensial sumber PAD.

Dan dengan didukung oleh program pemerintah Kalimantan Timur “*Visit Kaltim Year 2014*”, merupakan peluang untuk seluruh kota/ kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Timur dalam menunjukkan potensi pariwisatanya. Serta mewujudkan Provinsi Kaltim sebagai provinsi wisata dengan kekayaan tujuan wisata yang beraneka ragam. Hal tersebut juga mendukung potensi pariwisata kota Balikpapan yang memiliki hutan tropis, hutan mangrove, situs sejarah, pantai, museum dan kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup mengenai konservasi fauna dan flora yang berjarak sangat dengan pusat kota.

Secara otomatis sektor pariwisata harus terus meningkatkan strategi agar jasa yang diliputi oleh sektor ini dapat merealisasikan pajak penerimaan daerah yang telah direncanakan dan dengan majunya sektor pariwisata tersebut juga diharapkan dapat menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat.

Perumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan masalah (*Problem question*) sebagai berikut : Bagaimana strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar)?

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar).

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran bagi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata (Disporabudpar), penulis, dan penulis lainnya

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004 :1-7).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Aminullah (2001: 371 – 372): bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Ndraha 2003: 492-499) bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat

Tingkatan Kebijakan Publik

Berdasarkan teori yang dikemukakan Bromley (2006 :17), kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu:

1. *policy level* (tingkat pembuat kebijakan) diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif,
2. *organizational level* (tingkat koordinasi) diperankan oleh lembaga eksekutif.
3. *operational level* (tingkat pelaksana) dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian.

Pengertian Strategi

Menurut Hamel dan Prahalad (2006 : 51) pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

Menurut Robinson Jr., (2003 : 56), mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.

Menurut Lynch (2006: 50-51) merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan organisasi, serta bagaimana memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi (Hariadi, 2005 : 28), yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Pengertian PAD

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Menguraikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sumber-sumber PAD

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Saragih (2010 : 65) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,
2. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2005 : 68), “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004 : 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “1) bagian laba Perusahaan Milik Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi”.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2005 : 69), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah”

Potensi Peningkatan PAD dari Pariwisata

Dalam melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan bermacam jasa dan produk wisata yang dibutuhkannya. Berbagai macam jasa dan produk wisata inilah yang disebut dengan komponen pariwisata. Komponen pariwisata ini dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat, atau siapapun yang berminat untuk menyediakan jasa pariwisata, komponen pariwisata meliputi komponen dalam penyediaan destinasi pariwisata dengan komponen yang dimuat di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pada pasal 1 ayat 6 yaitu:

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Fasilitas umum

3. Angkutan wisata / aksesibilitas
4. Sarana dan prasarana
5. Serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Dengan mengetahui komponen destinasi pariwisata di atas, maka arah pengembangan pembangunan pariwisata bisa terarah dengan baik. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh jika pembangunan pariwisata ini terarah dan bisa memancing minat wisatawan untuk berkunjung.

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat menggali potensi yang ada di daerah termasuk sektor pariwisatanya.

Pengelolaan Pariwisata

Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Analisis SWOT

Pengertian Analisis SWOT

Analisa SWOT adalah suatu metoda penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari *Strength* (S), *Weakness* (W), *Opportunities* (O), dan *Threats* (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor eksternal (O dan T) dan faktor internal (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Petunjuk umum yang sering diberikan untuk perumusan adalah :

1. Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S). Analisis ini diharapkan membuahkan rencana jangka panjang.
2. Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan (T dan W). Analisa ini lebih condong menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana perbaikan (short-term improvement plan).

Dapat disimpulkan bahwa *analisis SWOT* adalah perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman.

Definisi Konseptual

Strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah rencana atau cara yang dilakukan oleh Dispenda Kota Balikpapan dalam menggali potensi dari sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD yang diperoleh dari sektor pajak daerah melalui peningkatan pendapatan pajak daerah pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dengan tujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang, dan bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2013:1) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang didasari dari Analisis SWOT mengenai strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui pajak daerah dari sektor pariwisata, dengan indikator :

- a. Analisis Strategi
- b. Perumusan Strategi
- c. Implementasi Strategi

Sumber dan Jenis Data

Menurut Pabundu (2006: 57-58) Jenis data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer yang merupakan data yang diperoleh dari objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pertanyaan yang sesuai.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi lain yang telah dikumpulkan atau dilaporkan lebih dahulu oleh orang atau instansi di luar penulis itu sendiri seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta buku-buku referensi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Suprayogo (2013:34) mengemukakan bahwa, Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut.

- a. Narasumber (Informan)
- b. Tempat atau lokasi
- c. Dokumen

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan dan mempelajari bahan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung ke objek penelitian.
 - a. Wawancara, yaitu mewawancarai orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi.
 - b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang relevan.
 - c. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung ke objek.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik SWOT yang merupakan singkatan yang diambil dari huruf depan kata *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*, yang dalam bahasa Indonesia mudahnya diartikan sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu perusahaan untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat oleh perusahaan itu sendiri. Kotler (2008 : 88) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman disebut analisis SWOT. Udan (2005:118) mendefinisikan analisis SWOT adalah "Penilaian/*assessment* terhadap indentifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu kondisi dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani peluang dan ancaman.
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman.
- c. Peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam suatu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.
- d. Ancaman (*Threat*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa

dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Pariwisata Kota Balikpapan

Kota Balikpapan

Kota Balikpapan terletak diantara 1°LS-1,5°LS dan 116,5°BT-117°BT. Terdiri dari 6 Kecamatan, berbatasan dengan kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kertanegara, Selat Makassar, dan Kabupaten Pasir. Luas wilayah kurang lebih 503.306 Km². Walaupun suku Dayak merupakan suku asli, tapi kehidupan multi-ethnis (heterogen) merupakan salah satu ciri kehidupan Kota ini. Adalah tidak berlebihan menyebut Kota Balikpapan sebagai "Kota Minyak". Selain terdapat banyak Kilang minyak, hari jadi kota ini tanggal 10 Februari 1897, diambil dari hari pengeboran minyak pertama (Mathilda) di Kota ini. Terletak di Pulau Kalimantan, salah satu pulau yang dikenal dunia karena Hutan-Tropisnya, Menjadikan Kota Balikpapan sebuah Kota minyak dan industri yang berwawasan lingkungan. Pribadi yang kental ini tercermin dengan tertatanya Kota Balikpapan sebagai salah satu kota metropolis di Indonesia yang kurang lebih 52% (lima puluh satu persen) dari luas wilayahnya merupakan: wilayah hijau, konservasi, preservasi dan Hutan-Lindung.

Gambaran Umum Disporabudpar Kota Balikpapan

Kedudukan Disporabudpar Kota Balikpapan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) kota Balikpapan saat ini terletak di Jl. MT. Haryono Dalam Kel. Sungai Nangka (Balikpapan Tennis Stadium). Kedudukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menurut Perda No 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, serta dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembahasan

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata

Pada bagian ini penulis ingin memaparkan dan membahas hasil-hasil penelitian yang penulis dapatkan dari lapangan seperti pada bagian sebelumnya. Bagian ini merupakan rangkaian dari penelitian ilmiah untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata.

Pada setiap penulisan ilmiah ilmu sosial tidak dapat dilakukan pengukuran yang pasti. Namun, dengan analisis dan pengaturan dari masing-masing fokus, penulis di harapkan memperoleh hasil penelitian yang mendekati realita.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah analisis SWOT yaitu evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menurut Kotler (2008 : 88).

Dari analisis SWOT tersebut dapat diketahui strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan, diantaranya SO, WO, ST dan WT. dari alternatif-alternatif strategi tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

1. Strategi menggunakan kekuatan internal Disporabudpar dalam meraih peluang yang ada, antara lain dengan mewujudkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan kearifan lokal, menambah dan memperbaiki fasilitas guna menunjang kebutuhan wisatawan, mengolah kembali peraturan yang ada agar dapat dimaksimalkan dalam implementasinya. Agar lebih maksimal pula objek pungutan pajaknya
2. Strategi dalam mengurangi dampak dari ancaman eksternal dengan kekuatan perusahaan yang dimiliki, antara lain menjadikan Mengadakan pelatihan bertaraf internasional guna meminimalisir kemampuan asing dalam menjadi tenaga kerja. Menerapkan ekowisata agar pembangunan tetap berbasis ekologi. Melakukan AMDAL dalam pembangunan untuk menerapkan pembangunan yang sehat dampaknya bagi alam. Mencanangkan pelayanan prima demi memberi kenyamanan
3. Strategi dalam mengurangi kelemahan dan ancaman, antara lain menerapkan basis informasi yang lebih modern dengan *e-information* yang lebih sering diperbaharui dan mengadakan acara-acara yang mengandung unsur hiburan tapi mengedukasi atau memiliki dasar pendidikan (*edutainment*)

Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strenght*)

Dalam pelaksanaan strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui sektor pariwisata, kota Balikpapan melalui Disporabudpar memiliki dua tipe pendekatan strategi yang diterapkan yaitu melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dimaksudkan agar strategi dapat terimplementasi secara luas dan merata dengan sasaran yang tepat yaitu pelaku usaha wisata, masyarakat, dan elemen lainnya sesuai dengan tujuannya. Hal ini diperkuat oleh Robinson Jr., (2003 : 56) yang mendefinisikan strategi sebagai seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan.

Dalam tindakan yang menghasilkan strategi tentu hal tersebut didahului oleh dimilikinya elemen penunjang yang kuat. Begitu juga kota Balikpapan, kota yang juga mencanangkan diri untuk menjadi kota wisata ini memiliki beberapa kekuatan dalam bidang pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan strategi hal ini diperkuat dengan kekuatan itu terdapat pada lokasi kota Balikpapan yang strategis sebagai pintu gerbang kota-kota di daerah Kalimantan Timur. Balikpapan juga ditunjang oleh

bandara bertaraf internasional yang mendukung penerbangan dalam dan luar negeri. Selain itu kota ini juga didukung dengan banyaknya restoran, hotel dan area hiburan. Tentu ini menjadi nilai tambah bagi dunia pariwisata kota Balikpapan dalam menangani peluang dan ancaman.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Udan (2005:118) yang mengatakan bahwa Kekuatan (*Strenght*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani peluang dan ancaman.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam data yang penulis yang peroleh dari lapangan mengenai kelemahan dari strategi yang diterapkan disporabudat kota Balikpapan yang menghambat implementasi peningkatan PAD dari sektor pariwisata adalah masih kurangnya dioptimalkan usaha hiburan dan reklame dalam menunjang peningkatan PAD dan penghasilan dari pajak ini masih dianggap sebagai penunjang atau pelengkap. Kota Balikpapan juga masih lemah dalam mengelola SDM yang berkualitas. Dan sarana dan prasarana wisata seperti aksesibilitas, akomodasi dan penunjang lainnya masih harus dibenahi.

Hal tersebut sangat di sayangkan mengingat Balikpapan memiliki sejumlah fasilitas bertaraf internasional. Namun dengan diketahuinya kelemahan tersebut dapat membantu mencari tahu kompetensi peluang dan ancaman yang akan ditimbulkan hal ini sesuai dengan pernyataan Udan (2005 :118) yaitu kelemahan (*Weakness*) adalah situasi internal organisasi yang berupa kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki organisasi yang dapat digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman

Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

Dari hasil penelitian dan penyajian data yang penulis lakukan di temukan beberapa peluang-peluang yang dimungkinkan dapat di aplikasikan di kota Balikpapan. Melihat telah diketahuinya kekuatan dan kelemahan dari strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui sektor pariwisata. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui peluang yang besar pengaruhnya dalam usaha meningkatkan PAD kota Balikpapan seperti dengan terwujudnya Balikpapan sebagai kota MICE, kota industri dan jasa, pusat penelitian hutan tropis dan mangrove serta terwujudnya Balikpapan sebagai pusat informasi yang mengakomodir objek wisata Kaltim.

Dengan dikondisikannya sumberdaya yang memiliki peluang memberikan peningkatan pendapatan asli daerah kota Balikpapan guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Udan (2005:118) yang mengatakan bahwa peluang (*Opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam suatu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

b. Ancaman (*Threat*)

Dengan diketahuinya peluang dalam suatu strategi tentu hal tersebut juga dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari peluang tersebut. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan juga menemukan dampak negatif atau ancaman yang dapat terjadi jika peluang dalam strategi peningkatan PAD kota Balikpapan melalui sektor pariwisata dikondisikan. Adapun ancaman-ancaman yang dapat terjadi menurut penelitian penulis di lapangan adalah ancaman akan adanya bandara baru di kota kabupaten lain yang berpotensi mengurangi jumlah penerbangan melalui Balikpapan. Selain itu berkurangnya lahan hijau untuk pembangunan yang akan dilakukan di kota Balikpapan, serta akan adanya ancaman berupa SDM lokal yang terancam keberadaannya dengan adanya AFTA.

Dan jika hal ini terjadi tentu akan ada kesulitan-kesulitan dalam strategi peningkatan PAD kota melalui pajak daerah sektor pariwisata yang akan meminimkan keuntungan bahkan merugikan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Udan (2005 :118) yang mengatakan Ancaman (*Threat*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Melalui Pajak Daerah Sektor Pariwisata, maka pada bab ini dapat diambil secara garis besar sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh disporabudpar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor pariwisata memiliki dua tahapan yaitu secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam tahap intensifikasi disporabudpar menerapkan strategi yang dilakukan secara terus menerus yaitu dengan pendekatan kepada masyarakat dengan cara mensosialisasikan perda, melaksanakan pembinaan SDM, disporabudpar juga memantau dan mengawasi serta meningkatkan tim penagih dan juga memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi wajib pajak dan retribusi usaha pariwisata. Dan dari tahap ekstensifikasi disporabudpar selalu terus menggali potensi dan menginovasi.
2. Dari strategi yang dilakukan oleh disporabudpar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan melalui pajak daerah sektor pariwisata, strategi yang telah di aplikasikan dengan baik adalah mensosialisasikan perda dan pembinaan SDM agar lebih berkualitas namun, cukup mengecewakan karena kurang optimalnya strategi dalam memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi usaha daerah belum diaplikasikan dengan baik. Selain itu strategi ekstensifikasi yang berusaha untuk terus menggali potensi dan menginovasi juga belum diimplementasikan dengan optimal.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan kekuatan internal Disporabudpar dalam meraih peluang yang ada, antara lain dengan mewujudkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas serta meningkatkan kearifan lokal, menambah dan memperbaiki fasilitas guna menunjang kebutuhan wisatawan, mengolah kembali peraturan yang ada agar dapat dimaksimalkan dalam implementasinya. Agar lebih maksimal pula objek pungutan pajaknya.
2. Meminimalisir dampak dari ancaman eksternal dengan kekuatan perusahaan yang dimiliki, antara lain menjadikan Mengadakan pelatihan bertaraf internasional guna meminimalisir kemampuan asing dalam menjadi tenaga kerja. Menerapkan ekowisata agar pembangunan tetap berbasis ekologi. Melakukan AMDAL dalam pembangunan untuk menerapkan pembangunan yang sehat dampaknya bagi alam. Menganangkan pelayanan prima demi memberi kenyamanan.
3. Mengupayakan mengurangi kelemahan dan ancaman, antara lain menerapkan basis informasi yang lebih modern dengan *e-information* yang lebih sering diperbaharui dan mengadakan acara-acara yang mengandung unsur hiburan tapi mengedukasi atau memiliki dasar pendidikan (edutainment).

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Santoso. 1992. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3. Gramedia, Jakarta.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Fadhilah, Putra. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta
- Haris Syamsuddin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.
- Ismail, Fauzi. 2005. Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Forum LSM DIY, Yogyakarta.
- Kertapaja, Koswara. 2010. *Pemerintahan Daerah*, Inner, Jakarta.
- Miftah Thoha. 1990. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu administrasi Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pearce II John, Junior Richard, 2003. *Strategic,formulation,implementation,and control*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Pitana I Gde, I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.

Rangkuti Freddy, 2010. Analisis SWOT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Resmi Siti .2006. *Analisis Perpajakan 1&2*. Salemba Empat, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2005. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rineka Cipta, Jakarta.

Suandy Erly 2005. *Hukum Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Administrasi Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.

Udan, T Ripomo, 2005. *Analysis SWOT*. Andi, Yogyakarta.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisata*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 *tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 *tentang Jenis Pajak Daerah*.

Sumber-sumber Internet :

http://dispenda.go.id/peraturan/uu/32_2004.pdf

<http://dispendabalikpapan.go.id/2014/04/pendapatan-asli-daerah-kota-balikpapan.html>

http://kemenkeu.go.id/peraturan/uu/33_2004.pdf

<http://balikpapa.go.id/peraturan-pemerintah-kota-balikpapan-dalam-mengolah-ruang-dan-wilayah-kota.html>